

2022



KANTOR GUBERNUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 562811; Fax : (0274) 564544

Surel : bpka@jogjaprovo.go.id

Laman : bpka.jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas dan penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

**KEPALA BPKA DIY**

WIYOS SANTOSO, SE., M.A.
NIP. 19680215 199403 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”:
 - Diukur dengan indikator Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 100%, tetap (target maksimal).
2. Capaian sasaran strategis 2 “Optimalisasi aset-aset Pemda DIY”:
 - Diukur dengan indikator nilai rupiah proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebanyak Rp6.967.568.518,00; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022, realisasi Rp15.486.233.611,00. Dengan demikian capaian ini melebihi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 222,26%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak Rp5.239.098.025,00 terjadi peningkatan sebanyak Rp10.251.135.586,00.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Era revolusi industri dan era society 5.0 serta kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik secara SMART;
2. Optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan penilaian barang milik daerah atas kondisi perekonomian maupun penilaian untuk pemanfaatan aset.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
BAB I Pendahuluan.....	7
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	7
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.4 Isu-Isu Strategis	14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020	18
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	31
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	32
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	32
3.2 Realisasi Anggaran	46
3.3 Inovasi	47
BAB 4 Penutup	63
L A M P I R A N	64

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	15
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2022.....	16
Tabel I.4	Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	18
Tabel II.1	Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan AsetDIY 2017-2022	19
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
Tabel II.3.1	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	20
Tabel II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	29
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2022	30
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2022.....	30
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 20220	32
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	33
Tabel III.4	Pengukuran Capaian Sasaran 1.....	35
Tabel III.5	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1.....	35
Tabel III.6	APBD DIY Tahun Anggaran 2021 dan 2022	36
Tabel III.7	Realisasi APBD BPKA DIY Tahun Anggaran 2021 dan 2022	38
Tabel III.8	Penetapan APBD	39
Tabel III.9	Program, kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD T.A. 2023.....	40
Tabel III.10	Kesesuaian & Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemda DIY T.A.2021....	40
Tabel III.11	Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2022	41
Tabel III.12	Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Optimalisasi BUMD	42
Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	44
Tabel III.14	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2.....	45
Tabel III.15	Nilai Realisasi Optimalisasi Aset Tahun 2022	45
Tabel III.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022	46
Tabel IV.1	Inventarisasi Lintas Sektor BPKA DIY	57

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	9
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	12
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	31
Gambar II.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah	31
Gambar II.3 Aplikasi E- Persediaan	31
Gambar III.1 Penghargaan atas TP2DD	37
Gambar III.2 Penghargaan atas Pelayanan Prima	39
Gambar III.3 Penghargaan atas Opini WTP dan Penyaluran DAK	41

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

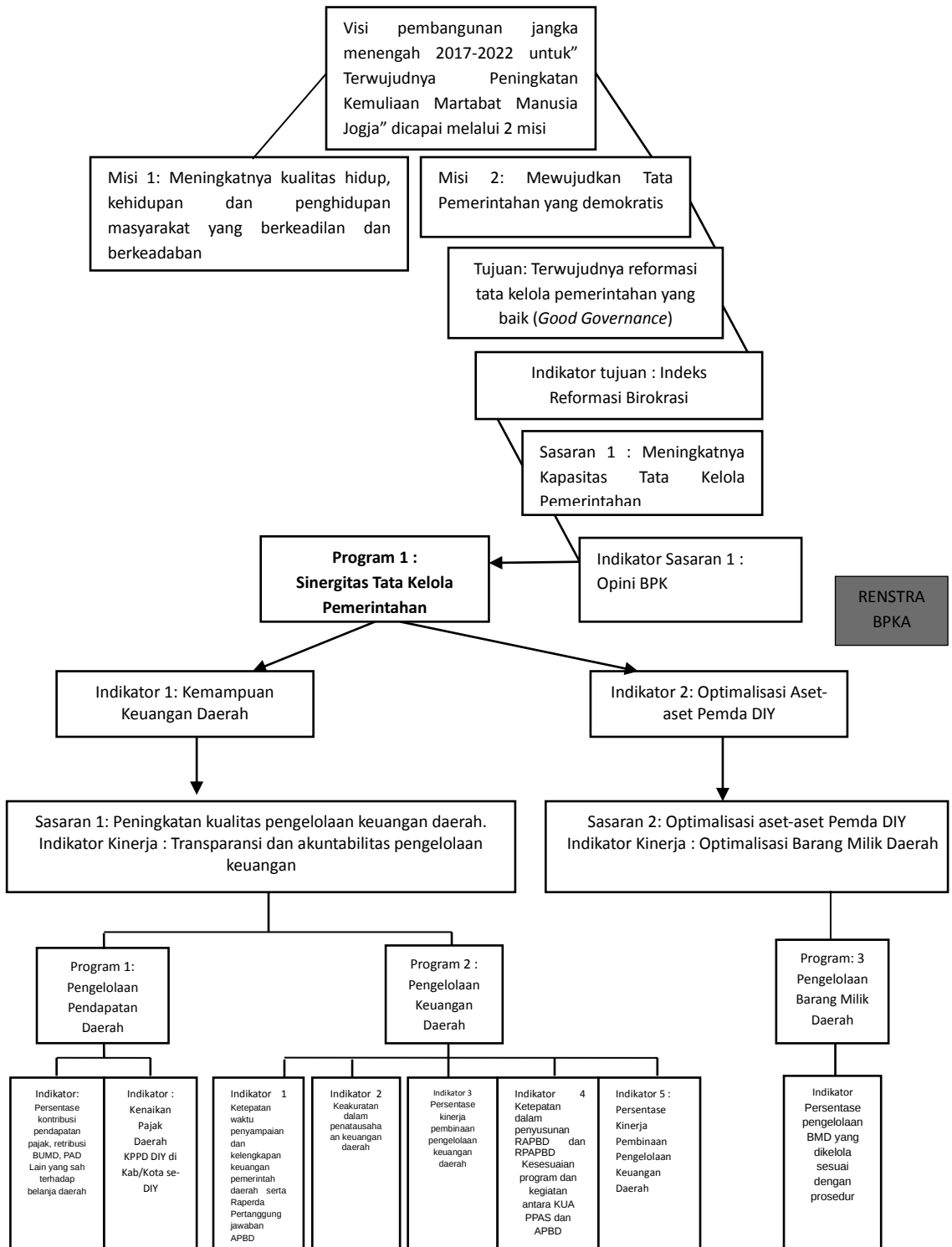
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



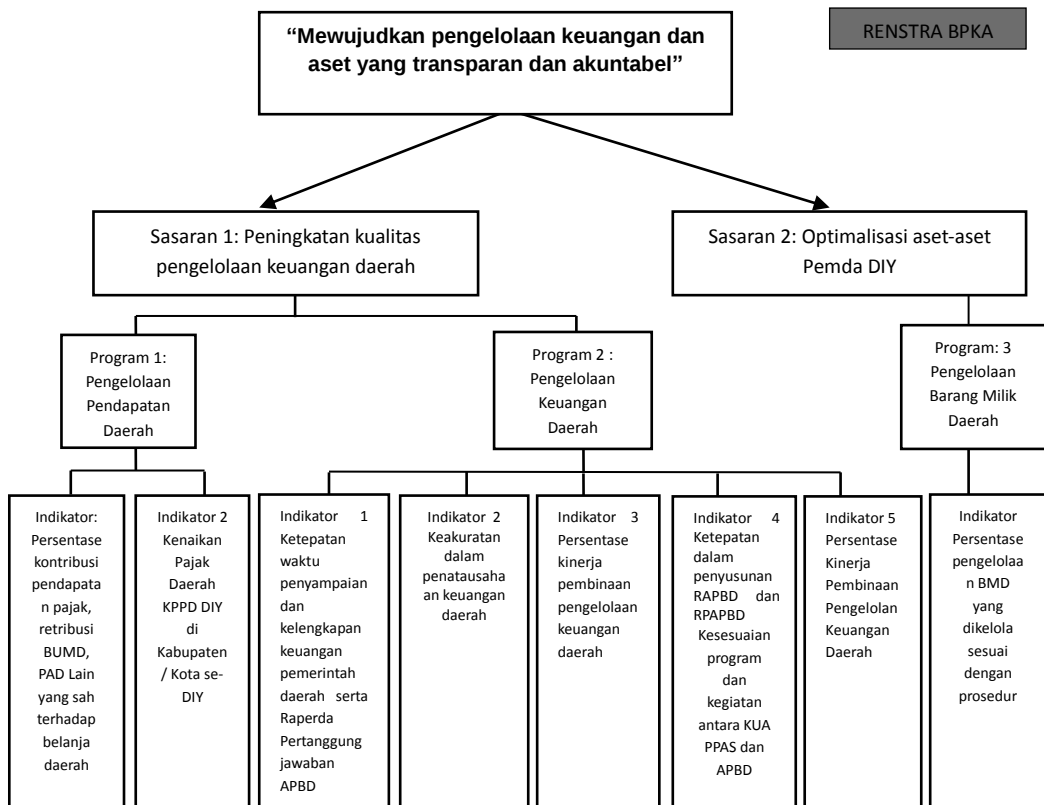
Sumberdata: Renstra BPKA DIY 2017-2022



1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

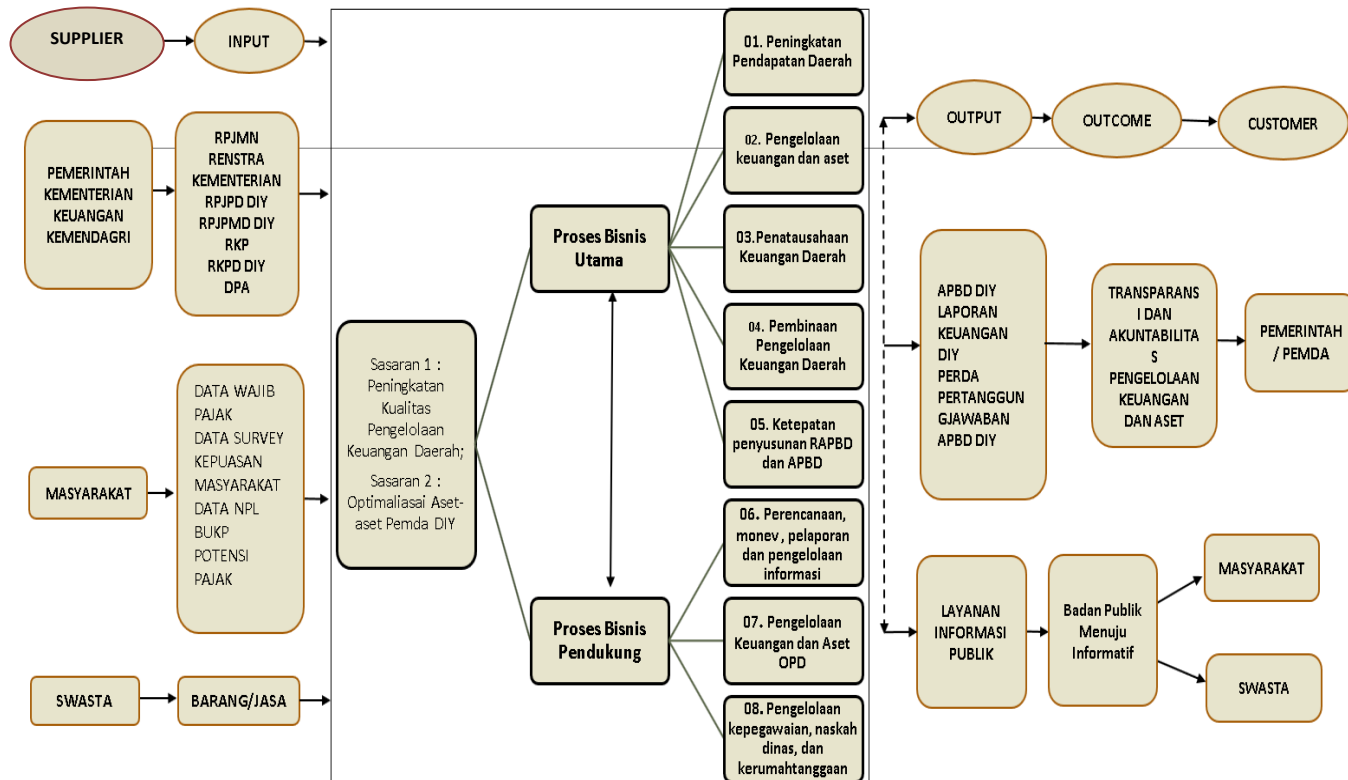
Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY



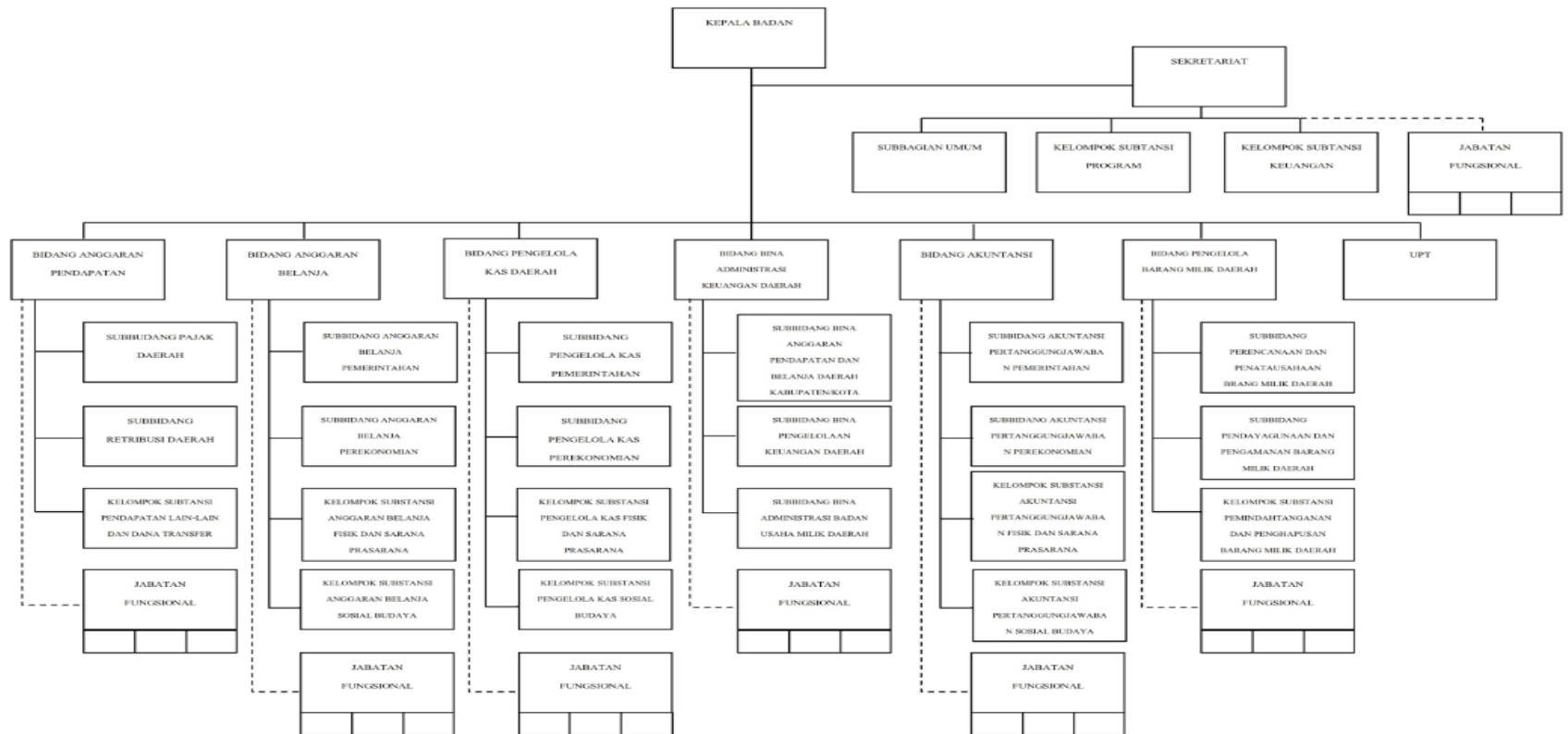
Sumber data : Renstra BPKA DIY Tahun 2017-2022



Peta Proses Bisnis Pencapaian Sasaran Kinerja OPD



STRUKTUR ORGANISASI BPKA DIY



1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Badan ;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.



Sesuai pelaksanaan tugas fungsi BPKA dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Badan 2. Sekretaris: 1) Kasubbagian Umum; 2) Subkoordinator Program; 3) Subkoordinator Keuangan. 3. Kepala Bidang Anggaran Pendapatan: 1) Kasubbidang Pajak Daerah; 2) Kasubbidang Retribusi Daerah; 3) Subkoordinator Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer. 4. Kepala Bidang Anggaran Belanja: 1) Kasubbidang Anggaran Belanja Pemerintahan; 2) Kasubbidang Anggaran Belanja Perekonomian; 3) Subkoordinator Anggaran Belanja Fisik dan Sarpras; 4) Subkoordinator Anggaran Belanja Sosial Budaya. 5. Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah: 1) Kasubbidang Pengelola Kas Pemerintahan; 2) Kasubbidang Pengelola Kas Perekonomian; 3) Subkoordinator Pengelola Kas Fisik dan Sarpras; dan 4) Subkoordinator Pengelola Kas Sektor Sosial Budaya. 6. Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah: 1) Kasubbidang Bina APBD Kab/Kota; 2) Kasubbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Kasubbidang Bina Administrasi BUMD. 7. Kepala Bidang Akuntansi: 1) Kasubbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan; 2) Kasubbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian; 3) Subkoordinator Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarpras; dan 4) Subkoordinator Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya. 8. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Kasubbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; 2) Kasubbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan 3) Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi.	1. Dibawah koordinasi Subkoordinator Program: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 2) Analisis Sistem Informasi. 2. Dibawah koordinasi Subkoordinator Keuangan: 1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan ; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikasi Data Laporan Keuangan. 3. Dibawah Kasubagian Umum: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranana Kearsipan; 4) Analis SDM Aparatur; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi. 4. Dibawah Kasubbidang Pajak Daerah: 1) Pengadministrasi Umum ; 2) Analis Pajak Daerah. 5. Dibawah Kasubbidang Retribusi: 1) Analis Retribusi Daerah; 2) Analis Pendapatan Daerah . 6. Dibawah Kasubbidang Anggaran Belanja Pemerintahan: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Analis Perencanaan Anggaran . 7. Dibawah Kasubbidang Anggaran Belanja Perekonomian: 1) Analis Perencanaan Anggaran 8. Dibawah Kasubbidang Pengelola Kas Pemerintahan: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Analis Perbendaharaan. 9. Dibawah Kasubbid Pengelola Kas Perekonomian: 1) Analis Perbendaharaan. 10. Dibawah Kasubbidang Bina APBD Kab/Kota: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Analis Pengelolaan keuangan. 11. Dibawah Kasubbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah: 1) Analis Pengelolaan keuangan. 12. Dibawah Kasubbidang Bina Administrasi BUMD: 1) Pengevaluasi Perkembangan BUMD 13. Dibawah Kasubbid Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Penyusun laporan Keuangan. 14. Dibawah Kasubbid Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian: 1) Penyusun laporan keuangan. 15. Dibawah Kasubbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah. 16. Dibawah Kasubbiang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah: 1) Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah; 2) Analis Aset Daerah.

1.4. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset, isu strategis yang melingkupi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel adalah tuntutan dan harapan masyarakat, karena berkaitan erat dengan bagaimana pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari aspek perencanaan, penganggaran, penetapan dan pelaksanaan kinerja, monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja. Aspek-aspek diatas harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggungjawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pengelolaan keuangan dan pembelanjaan anggaran harus dimanfaatkan untuk pembangunan yang dirasakan oleh lapisan masyarakat.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	12	12				12	8	4				5	7
	2. Pengawas	29		29			28	15	13				16	12
	3. Pelaksana	375		188	181	6	186	15	76	44	46	5	108	78
C.	Jabatan Fungsional	12		12			8	3	5				3	5
	Jumlah	429	13	48	160	6	235	42	98	44	46	5	133	102

Sumber: Kepegawaian BPKA DIY, Desember 2022. Data diolah

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan Strata-1 sebanyak 98 orang (41,7%) , disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 46 orang (19,6%),Diploma-3 sebanyak 44 orang (18,7%), Strata-2 sebanyak 42 orang (17,9%) dan pendidikan SLTP/setingkat sebanyak 5 orang (2,1%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki; demikian juga untuk jabatan struktural lebih sedikit dijabat perempuan namun untuk fungsional lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan keadilan dan kesetaraan gender dalam manajemen sumber daya aparatur .

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 94 orang pada jabatan, terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrasi pengawas, 88 orang jabatan administrasi pelaksana dan 4 orang jabatan fungsional. Terdapat 5 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, namun dengan kebijakan menambah personil non PNS dan tenaga bantu (Naban) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi .

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1.	Tanah	18 bidang	62.119.599.053
2.	Alat Besar	53 unit	11.164.681.250
3.	Alat Angkutan	64 unit	6.535.290.200
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	32 unit	1.264.013.925
5.	Alat Pertanian	20 nit	49.888.000
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.255 unit	44.782.897.361
7.	Alat studio, Komukiasi dan Pemancar	760 unit	5.287.064.040
8.	Alat kedokteran dan kesehatan	52 unit	85.419.997

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
9.	Alat Laboratorium	34 unit	921.769.000
10.	Alat Persenjataan	4 unit	70.614.000
11.	Komputer	1.836 unit	18.489.011.855
12.	Rambu-rambu	25 unit	8.952.000
13.	Peralatan Olah Raga	2 unit	84.395.000
14.	Bangunan gedung	73 unit	154.027.285
15.	Bangunan Menara	1 unit	30.300.000
16.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4 unit	1.830.109.000
17.	Bangunan Air	14 unit	1.708.177.900
18.	Instalasi	17 unit	587.574.250
19.	Jaringan	12 unit	3.316.227.700
Aset Tetap Lainnya			
1	Bahan Perpustakaan	2.477 unit	216.950.690
2	Barang bercorak kesenian / kebudayaan/olahraga	12 unit	2.600.000
3	Tanaman	1 unit	14.850.000
4	Konstruksi dalam Pengerjaan	3 unit	401.317.200
Jumlah			312.998.987.539

SumberData: Neraca Aset BPKA per 31 Desember 2022 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 4 (empat) unit kendaraan dinas bermotor perorangan, 24 (dua puluh empat) unit kendaraan bermotor penumpang, 2 (dua) unit kendaraan bermotor barang dan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan roda dua untuk operasional. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana tahun 2022 mencapai ideal. Namun dilihat secara kualitatif masih perlu perbaikan maupun *upgrading*. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	5.288.716.235.400	5.407.663.603.049	118.947.367.649
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.969.939.952.910	2.113.523.015.707	143.583.062.797
4 1 01	Pajak Daerah	1.831.695.736.270	1.924.613.524.517	92.917.788.247
4 1 02	Retribusi Daerah	789.740.775	874.194.575	84.453.800

4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	104.889.783.509	106.108.775.113	1.218.991.604
4	1	04	Lain-lain PAD Yang Sah	32.564.692.356	81.926.521.502	49.361.829.146
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	3.311.199.782.490	3.286.900.087.342	(24.299.695.148)
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.310.328.489.000	3.286.028.793.852	(24.299.695.148)
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490	871.293.490	0
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000	7.240.500.000	(336.000.000)
Jumlah Pendapatan				5.288.716.235.400	5.407.663.603.049	118.947.367.649
5			BELANJA DAERAH	1.491.353.314.463	1.500.550.634.235	9.197.319.772
5	1		BELANJA OPERASI	118.000.203.561	117.482.801.515	(517.402.046)
5	1	01	Belanja Pegawai	82.057.309.019	81.163.193.644	(894.115.375)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.942.894.542	36.319.607.871	376.713.329
5	2		BELANJA MODAL	3.238.526.360	4.617.323.710	1.378.797.350
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.096.566.360	4.330.363.710	1.233.797.350
5	2	03	Belanja Modal Gedung & Bangunan	91.960.000	286.960.000	195.000.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	94.764.494.559	62.545.932.869	(32.218.561.690)
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	94.764.494.559	62.545.932.869	(32.218.561.690)
5	4		BELANJA TRANSFER	1.275.350.089.983	1.315.904.576.141	40.554.486.158
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	743.441.355.389	839.016.298.042	95.574.942.653
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	531.908.734.594	476.888.278.099	(55.020.456.495)
Jumlah Belanja				1.491.353.314.463	1.500.550.634.235	9.197.319.772
Total Surplus/(Defisit)				3.797.362.920.937	3.907.112.968.814	9.197.319.772
6			PEMBIAYAAN DAERAH	396.736.497.517	390.811.837.414	(5.924.660.103)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				570.412.054.517	564.487.394.414	(5.924.660.103)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				173.675.557.000	173.675.557.000	0
Pembiayaan Netto				396.736.497.517	390.811.837.414	(5.924.660.103)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKA Tahun 2022, diolah

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula Rp1.491.353.314.463,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.500.550.634.235,00 atau bertambah Rp 9.197.319.772,00. Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan cerminan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	REKOMENDASI LHE SAKIP Surat Inspektur DIY Nomor 700/01104: tanggal 15 Maret 2022,	TINDAKLANJUT
1.	Meningkatkan kinerja pada aspek evaluasi internal, khususnya evaluasi internal atas pelaksanaan sub kegiatan melalui penyempurnaan metode pengumpulan data dan supervisi	Melakukan evaluasi internal pelaksanaan sub kegiatan melalui penyempurnaan metode pengumpulan data dan supervisi
2.	Meningkatkan kinerja pada aspek pelaporan kinerja khususnya kualitas laporan kinerja instansi sehingga uraian hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja lebih informatif	Menyusun laporan kinerja instansi sehingga uraian hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja lebih informatif
3.	Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja kinerja instansi sehingga seluruh target baik output maupun <i>outcome</i> yang ditetapkan dapat tercapai	Melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja instansi sehingga seluruh target baik output maupun <i>outcome</i> yang ditetapkan dapat tercapai.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda realokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk pelayanan prima kepada wajib pajak. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selama lima tahun adalah:

“Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel”

Adapun sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 2017-2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	Rp	n/a	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.967.568.518

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Perbaikan manajemen terhadap semua proses bisnis	1. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola keuangan dan pengelola pendapatan 3. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan 4. Meningkatkan sarpras yang mendukung peningkatan pendapatan
2.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	1. Inventarisasi barang milik daerah untuk diperoleh aset idle 2. Mengevaluasi atas pelaksanaan roadmap pemanfaatan barang milik daerah	1.1. Meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme maupun produktifitas SDM pengelola barang di Pemda DIY 2.1. Meningkatkan peran optimalisasi BMD sebagai kontributor peningkatan pendapatan 2.2. Penyusunan SOP pengelolaan BMD 2.3. Monev dan pendampingan pengelolaan BMD pada OPD

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1. Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1. Program Pengelolaan Pendapatan	10.096.956.400	10.576.459.336	479.502.936
	1.1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.096.956.400	10.576.459.336	479.502.936
	1.1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.931.023.000	1.957.969.000	26.946.000
	1.1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	96.076.000	96.076.000	0
	1.1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	584.380.000	573.436.000	(10.944.000)
	1.1.1.4. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	2.208.673.400	2.222.333.400	13.660.000
	1.1.1.5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.276.804.000	5.726.644.936	449.840.936
	1.2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.377.008.861.542	1.385.130.562.010	(8.121.700.468)
	1.2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.894.220.000	3.724.996.000	(169.224.000)
	1.2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	405.695.000	357.190.000	(48.505.000)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	403.144.000	357.190.000	(45.954.000)
	1.2.1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	42.851.750	26.793.000	(16.058.750)
	1.2.1.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	37.396.750	29.368.000	(8.028.750)
	1.2.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	670.859.000	644.299.000	(26.560.000)
	1.2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah ttg APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD	1.047.303.500	1.160.543.000	113.239.500
	1.2.1.7. Koordinasi dan Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD	1.152.660.000	1.015.303.000	(137.357.000)
	1.2.1.8. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	134.310.000	134.310.000	0
	1.2.2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	513.534.000	513.534.000	0
	1.2.2.1. Evaluasi Rancangan Perda ttg APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD Kab/Kota	168.625.000	168.625.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.2.2.2. Evaluasi Rancangan Perda ttg Perubahan APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran PAPBD Kab/Kota	167.240.000	167.240.000	0
	1.2.2.3. Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	172.605.000	172.605.000	0
	1.2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Konsolidasi Provinsi dan Kab/kota dan Statistik Keuangan Pemda	5.064.000	5.064.000	0
	1.2.3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	458.088.000	338.088.000	(120.000.000)
	1.2.3.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.090.000	98.090.000	(20.000.000)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.2.3.2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dg Instansi terkait	339.998.000	239.998.000	100.000.000
	1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	817.406.500	892.406.500	75.000.000
	1.2.4.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	115.643.000	115.643.000	0
	1.2.4.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	23.495.000	23.495.000	0
	1.2.4.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggung Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi	424.305.750	424.305.750	0
	1.2.4.4. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	4.975.000	4.975.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.2.4.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8.871.000	8.871.000	0
	1.2.4.6. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	158.081.250	233.081.250	75.000.000
	1.2.4.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	48.419.000	48.419.000	0
	1.2.4.8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	33.616.500	33.616.500	0
	1.2.5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.371.325.613.042	1.379.661.537.510	(8.335.924.468)
	1.2.5.1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1.211.028.500	1.211.028.500	0
	1.2.5.2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	531.908.734.594	476.888.278.099	55.020.456.495
	1.2.5.3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	94.764.494.559	62.545.932.869	32.218.561.690
	1.2.5.4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	743.441.355.389	839.016.298.042	(95.574.942.653)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	1.387.105.817.942	1.395.707.021.346	8.601.203.404
2. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	1.3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.798.625.500	4.545.127.500	253.498.000
	1.3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.798.625.500	4.545.127.500	253.498.000
	1.3.1.1. Penyusunan Standar Harga	332.640.000	382.640.000	(50.000.000)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.3.1.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	26.211.000	76.211.000	(50.000.000)
	1.3.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	283.362.000	233.362.000	50.000.000
	1.3.1.4. Pengamanan Barang Milik Daerah	2.813.489.500	2.983.439.500	(169.950.000)
	1.3.1.5. Penilaian Barang Milik Daerah	1.099.510.000	576.062.000	523.448.000
	1.3.1.6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfa'atan, Pemi ndahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	243.413.000	293.413.000	(50.000.000)
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	4.798.625.500	4.545.127.500	253.498.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		1.391.904.443.442	1.400.252.148.846	8.347.705.404

Sumber data: Dokumen DPA dan Dokumen DPPA BPKATahun 2022, diolah

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99.601.948.021	100.298.485.389	(696.537.368)
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.161.000	75.118.000	(10.957.000)
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.538.000	23.138.000	(2.400.000)
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	38.623.000	33.973.000	(4.650.000)
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	18.007.000	18.007.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.990.345.019	81.096.229.644	(894.115.375)
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.727.189.019	80.833.073.644	(894.115.375)

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.200.000	235.200.000	0
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.715.500	16.715.500	0
	2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	11.240.500	11.240.500	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94.920.000	94.920.000	0
	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.920.000	94.920.000	0
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.817.603.000	1.816.094.000	(1.509.000)
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	122.997.000	122.997.000	0
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.078.000	419.078.000	0
	4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	257.056.000	246.097.000	(10.959.000)
	4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.729.200	52.729.200	0
	4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	338.970.800	308.970.800	(30.000.000)
	4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.792.000	48.792.000	0
	4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.966.000	508.066.000	44.100.000
	4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.386.000	54.386.000	0
	4.9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.628.000	54.978.000	(4.650.000)
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.358.323.360	4.459.636.710	(1.101.313.350)
	5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	636.290.000	636.290.000
	5.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	230.000.000	230.000.000

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	5.2. Pengadaan Mebel	52.885.000	52.885.000	0
	5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.364.848.633	1.736.384.910	(371.536.277)
	5.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	357.764.000	207.280.000	150.484.000
	5.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1.582.826.000	1.596.796.800	13.970.800
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.412.861.846	8.511.668.746	98.806.900
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.977.000	36.977.000	0
	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.532.531.046	3.631.337.946	98.806.900
	6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	445.055.000	445.055.000	0
	6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.398.298.800	4.398.298.800	0
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.863.733.796	4.244.818.289	(381.084.493)
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.590.000	9.590.000	0
	7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	808.637.796	809.022.289	384.493
	7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.386.510.000	1.391.510.000	5.000.000
	7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.041.725.000	1.406.625.000	(364.900.000)
	7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	617.271.000	628.071.000	10.800.000
	Total Anggaran Pendukung	99.601.948.021	100.298.485.389	(696.537.368)

Sumber data: Dokumen DPA dan Dokumen DPPA BPKA DIY Tahun 2022, diolah

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	21
					Triwulan II	48
					Triwulan III	75
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah	Rupiah	6.967.568.518	Triwulan I	2.245.441.800
					Triwulan II	2.427.733.600
					Triwulan III	3.419.000.000
					Triwulan IV	6.967.568.518

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 10.576.459.336,00
2.	Program Peningkatan Pendapatan KPPD		
3.	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp 1.385.130.562.010,00
4.	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah		
5.	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		
6.	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
7.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 4.798.625.500,00
8.	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah		
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 100.298.485.389,00
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
Jumlah Anggaran			Rp 1.500.550.634.235,00

Pada tahun 2022, Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan dilakukan karena ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	21
					Triwulan II	48
					Triwulan III	75
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah	Rupiah	6.967.568.518	Triwulan I	2.245.441.800
					Triwulan II	2.427.733.600
					Triwulan III	3.419.000.000
					Triwulan IV	6.967.568.518

Keterangan:

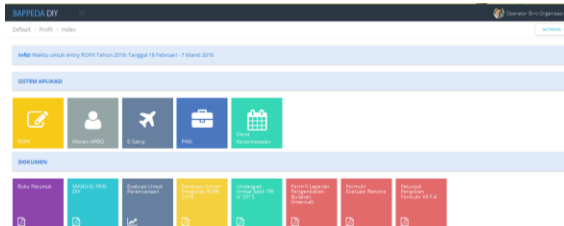
- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (APBD)	Rp 2.627.481.000,-
2.	Program Peningkatan Pendapatan KPPD		
3.	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	Rp1.326.817.617.122,-
4.	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah		
5.	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		
6.	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
7.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (APBD)	Rp 4.545.127.500,-
8.	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah		
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 84.205.249.628,-
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
Jumlah Anggaran			Rp1.418.195.475.250,00

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Gambar II.2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sumber : <http://sipd.iogjaprov.go.id>

3. Instrumen pendukung Persediaan berbasis Web untuk menghasilkan Laporan Persediaan yang akurat dan akuntabel. Aplikasi ini sebagai kontrol penggunaan barang persediaan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah sehingga dapat diketahui jumlah dan nominal barang persediaan secara *real-time* sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang Persediaan.

Gambar II.3 Aplikasi E-Persediaan



Sumber : <http://e-persediaan.go.id>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022			KRITERIA/KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indikator: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Meta Indikator: 1. Meningkatnya PAD (20%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (20%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) 4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (20%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)	%	100	100	100	100	100	Sangat Baik	100
2	Optimalisasi Aset asset Pemda DIY	Indikator: Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah Meta Indikator: Nilai proyeksi asset pengelola	rupiah	n/a	5.239.098.025	6.967.568.518	15.486.233.611	222,26	Sangat Baik	6.967.568.518

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi perhitungan: 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 20%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 20%) 4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 20.%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 20%)

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan penghitungan secara kualitatif terhadap 5 (lima) sub meta indikator yang dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \sum PAD + \sum APBD + \sum LKD + \sum KAD + \sum PKD$$

Keterangan:

- TA = Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
 $\sum PAD$ = sub meta indikator meningkatnya PAD
 $\sum APBD$ = sub meta indikator APBD yang tepat dan akurat
 $\sum LKD$ = sub meta indikator laporan keuangan akuntabel
 $\sum KAD$ = sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat
 $\sum PKD$ = sub meta indikator pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

Penghitungan masing-masing sub indikator adalah sebagai berikut:

1. Sub meta indikator meningkatnya PAD, digunakan untuk mengetahui besaran kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (n) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya (n-1), diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum PAD = PAD(n)/PAD(n-1)$$

Keterangan:

- $\sum PAD$ = meningkatnya PAD
PAD(n) = realisasi PAD tahun 2022
PAD(n-1) = realisasi PAD tahun 2021

2. Sub meta indikator APBD yang tepat dan akurat digunakan untuk mengetahui ketepatan penyusunan APBD baik APBD murni maupun APBD Perubahan sesuai dengan tatakala waktu dan akurasi dilihat dari konsistensi antara program kegiatan/sub kegiatan antara dokumen perencanaan dan RAPBD, diformulasikan:

$$\Sigma \text{APBD} = (\text{AB} + \text{BD}) / 2$$

Keterangan:

ΣAPBD = APBD yang tepat dan akurat

AB = APBD tepat waktu = 100%

BD = APBD akurat = $85\%(\text{P2}/\text{P1}) + 15\%(\text{K2}/\text{K1}) \times 100\%$

P2 = program sesuai RAPBD

P1 = program sesuai KUA PPAS

K2 = kegiatan sesuai RAPBD

K1 = kegiatan sesuai KUA PPAS

3. Sub meta indikator laporan keuangan akuntabel diukur dengan mencermati kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP.71/2010 dan ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Formulasi meta indikator laporan keuangan sebagai berikut:

$$\Sigma \text{LKD} = (\text{LK1 (sesuai)} + \text{KD2 (tepat waktu)})$$

Keterangan:

ΣLKD = laporan keuangan akuntabel

LK1 = laporan keuangan sesuai standar SAP = 60%

KD2 = laporan keuangan dan pertanggungjawaban tepat waktu = 40%

4. Sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat adalah untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan memperbandingkan antar dokumen SP2D dan SPM yang diterima, formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\Sigma \text{KAD} = \Sigma \text{SP2D} / \Sigma \text{SPM} \times 100\%$$

Keterangan:

ΣKAD = penatausahaan keuangan yang akurat

ΣSP2D = dokumen SP2D yang diterbitkan

ΣSPM = dokumen SPM yang diterima

5. Sub meta indikator kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten, diukur melalui hasil evaluasi APBD kabupaten/kota, regulasi keuangan daerah yang sesuai Sistem dan Prosedur, serta optimallisasi kinerja BUMD, diformulasikan sebagai berikut:

$$\Sigma \text{PKD} = \Sigma \text{EAP} + \Sigma \text{EAK} + \Sigma \text{EAD}$$

Keterangan:

ΣPKD = pembinaan pengelolaan keuangan daerah konsisten

Σ EAP	= evaluasi APBD Kabupaten/Kota
Σ EAK	= regulasi keuangan daerah sesuai sisdur
Σ EAD	= realisasi deviden BUMD

Hasil penghitungan kualitatif dari 5 (lima) sub meta indikator tersebut diatas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub meta Indikator	Hasil Sub meta-indikator	Capaian sub meta indikator	Bobot
Sub meta indikator meningkatnya PAD (Σ PAD) (bobot kualitatif sebesar 20%)	2.165.881.381.126,19,00	119,01%	20%
APBD yang tepat dan akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot kualitatif sebesar 20%).	100%	100%	20%
		Jumlah (TA)	100%

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100% (100/100) X 100%	100%	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% .
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, tercapai.
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Keberhasilan capaian Indikator Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut didukung dari:

- Capaian peningkatan pendapatan asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah BPKA DIY pada APBD tahun 2021 sebesar Rp 1.819.988.993.060,24 dan pada tahun 2022 sebesar Rp2.165.879.881.126,19 Artinya pada APBD tahun 2022 terdapat kenaikan PAD sebesar Rp 345.890.888.065,95 atau 19,01%. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.6 APBD DIY Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Kode	Uraian	Tahun	
		2021 (tahun n-1)	2022 (tahun n)
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.819.988.993.060,24	2.165.879.881.126,19
4.1.1	Pajak Daerah	1.688.443.843.923,00	1.951.266.436.219,31
4.1.2	Retribusi Daerah	1.020.834.115,00	870.821.800,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	96.338.516.913,54	108.239.513.315,87
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	34.185.798.108,70	105.503.109.791,01
Jumlah (Σ)		1.819.988.993.060,24	2.165.879.881.126,19

Sumberdata: APBD DIY TA.2021 dan 2022, diolah.

Perhitungan atas data dari tabel diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \Sigma \text{PAD} &= \text{PAD (n)}/\text{PAD(n-1)} \\
 &= 2.165.879.881.126,19/1.819.988.993.060,24 \times 100\% \\
 &= 119,01\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil 119,01% yang artinya target telah tercapai, sehingga sub meta indikator meningkatnya PAD dengan bobot 20% terpenuhi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja meningkatnya PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Intensifikasi pendapatan dilakukan dengan cara validasi dan pemutakhiran data untuk dapat menghitung potensi seakurat mungkin, sehingga target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara menggali potensi-potensi pendapatan baru yang mungkin muncul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Perbaikan layanan yang dilakukan termasuk melakukan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dan modernisasi administrasi sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menambah metode dan kanal-kanal pembayaran pajak dan

retribusi daerah karena dirasa mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya di tengah keterbatasan aktivitas selama pandemi.

Penyediaan kanal-kanal pembayaran digital baru juga sejalan dengan semangat Pemerintah Pusat untuk mendorong adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dari sisi pengelolaan pajak dan retribusi, Pemda DIY bekerjasama dengan PT Bank BPD DIY dengan dibukanya kanal pembayaran melalui *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* BPD DIY untuk layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga dibuka layanan pembayaran pajak daerah melalui *e-commerce GOJEK* dengan menu *GOBILLS*.

Atas perbaikan layanan kepada wajib pajak yang dilakukan dengan menyediakan kanal-kanal pembayaran digital baru memperoleh apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Gambar III.1 Penghargaan atas TP2DD



Selain itu dalam rangka mencapai target kinerja sasaran tahun 2022, intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan cara pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*, mengirimkan surat kepada wajib pajak melalui kegiatan Super PKB, melakukan sosialisasi kepada kelurahan di wilayah Samsat untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan di wilayah Samsat. Pelayanan secara *Drive Thru* juga telah diberikan untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara cepat tanpa turun dari kendaraan.

Dengan adanya fasilitas *E-Posti* dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajak cukup melalui mesin ATM. Perluasan jangkauan layanan dengan mendirikan SAMSAT Desa dan penambahan mobil layanan Satling baru dirasakan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sekitar SAMSAT Desa maupun tempat-tempat lain yang strategis.

Peningkatan pendapatan retribusi melalui Intensifikasi dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki potensi pendapatan, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Retribusi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi dari aset yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah untuk menggali

potensi pendapatan yang menjadi wewenangannya. Realisasi PAD Tahun 2022 berhasil meningkat dari realisasi PAD Tahun 2021, yaitu bertambah sebesar 345.890.888.065,95 atau 19,01% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan upaya pemungutan sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD sampai saat ini masih berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 90,09% dari total penerimaan PAD Tahun 2022.

Perbandingan antara realisasi pendapatan tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.7 Realisasi APBD BPKA DIY Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Kode	Uraian	Tahun		Bertambah/ berkurang	%
		2021 (Rp.)	2022 (Rp.)		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.819.988.993.060,24	2.165.879.881.126,19	345.890.888.065,95	19,01
4.1.1	Pajak Daerah	1.688.443.843.923,00	1.951.266.436.219,31	262.822.592.296,31	15,57
4.1.2	Retribusi Daerah	1.020.834.115,00	870.821.800,00	(150.012.315,00)	(14,70)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	96.338.516.913,54	108.239.513.315,87	11.900.996.402,33	12,35
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	34.185.798.108,70	105.503.109.791,01	71.317.311.682,31	208,62

Sumber data: Perhitungan APBD DIY tahun 2021 dan 2022, diolah

Dampak ekonomi akibat pandemi mempengaruhi kemampuan masyarakat wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, untuk itu Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan pajak, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disahkan pada tanggal 23 September 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Respon positif dari masyarakat luas yang memanfaatkan adanya kebijakan tersebut dapat terlihat dari animo masyarakat yang melakukan pembayaran pajak sebelum berakhirnya kebijakan, oleh karena itu kebijakan bebas denda ini juga dapat dinilai berhasil dan menjadi salah satu faktor tercapainya target penerimaan pajak daerah di tahun 2022.

Layanan kepada masyarakat/wajib pajak tersebut memperoleh apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diberikannya Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi kepada KPPD DIY di Kabupaten Sleman pada tanggal 8 Maret 2022, yang berhasil memperoleh predikat A sebagai Penyelenggaraan Pelayan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah

Kabupaten Kulonprogo sebagai peringkat kedua unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Lingkup BAPPENDA/SAMSAT Provinsi Tahun 2022.

Gambar III.2 Penghargaan atas Pelayanan Prima



b. Capaian APBD yang tepat dan akurat

Perda Perubahan APBD TA 2022 telah ditetapkan sesuai tata kala waktu sebagaimana dimaksud PP.12/2019 yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir, sedang Perda APBD 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, program, kegiatan maupun sub kegiatan konsisten dengan dokumen KUA dan PPAS 2022 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel III.8 Penetapan APBD

Uraian	Tanggal	Nomor	Keterangan
1	2	3	4
APBD Perubahan 2022	13 Oktober 2022	9/2022	Tepat = 100%
APBD 2023	30 Desember 2022	12/2022	

Sumber data :BPKA DIY tahun 2022, diolah

Tabel III.9 Program kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD TA.2023

Uraian	Jumlah		Keterangan
	Program	Kegiatan	
1	2	3	4
KUA PPAS	139	283	Akurat = 100%
RAPBD	139	283	

Sumber data : BPKA DIY tahun 2022, diolah

Akumulasi penghitungan data dari kedua tabel diatas,hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \sum \text{APBD} &= (\text{AB} + \text{BD}) / 2 \\
 &= 100\% + ((85\%(139/139 \times 100) + 15\%(283/283 \times 100)) / 2) \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil penghitungan diatas, sub meta indikator APBD tepat waktu dan akurat tercapai 100% sehingga bobot 20% terpenuhi.

Upaya yang dilakukan agar penyusunan APBD dan Perubahan APBD tepat waktu dan akurat adalah selalu mengikuti tahapan tata kala waktu sesuai pedoman peraturan yang berlaku dalam penyusunan APBD.

c. Capaian laporan keuangan daerah yang akuntabel

Diukur dengan melihat kelengkapan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai PP.12/2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri 77 tahun 2020 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Tabel III.10 Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY

No	Uraian	Penyajian Laporan		Penyusunan Laporan		Ket.
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Unsur SAP (PP.12/2019) (L1)					
	1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	v	-			Sesuai
	2) Neraca	v	-			
	3) Laporan Operasional (LO)	v	-			
	4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	v	-			
	5) Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	v	-			
	6) Laporan Arus Kas (LAK)	v	-			
Nilai (LK1)						60%
2	Penyusunan Laporan Keuangan (Permendagri 77/2020) (K2)					
	1) Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2021			Maret 2022	-	Tepat
Nilai (LK2)						40%

Sumber data: LHP BPK RI Tahun 2022, diolah

Penghitungan sesuai data diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \Sigma \text{LKD} &= (\text{LK1 (sesuai)} + \text{KD2 (tepat waktu)}) \\
 &= 60\% + 40\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan, sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD maksimal 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2021 *Unaudited* selesai disusun pada tanggal 10 Pebruari 2022. Setelah dilakukan *review* oleh Inspektorat DIY kemudian disampaikan kepada BPK RI pada tanggal 15 Pebruari 2022. Pada tahun 2022 Pemda DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Opini WTP minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012 s/d 2021.

Gambar III.3 Penghargaan Opini WTP dan Penyaluran DAK



d. Capaian penatausahaan keuangan yang akurat

Capaian kinerja penatausahaan yang akurat dihitung dengan cara membandingkan jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dengan jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sebagai berikut :

Tabel III.11 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	SP2D		
	Belanja Operasi	13.250 dokumen	-
	Belanja Operasi non Gaji	2.044 dokumen	-
2.	SPP/SPM		
	Belanja Operasi	13.250 dokumen	-
	Belanja Operasi non Gaji	2.044 dokumen	-

Sumber data: BPKA DIY tahun 2022, diolah

Penghitungan atas data diatas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\Sigma KAD &= \Sigma SP2D / \Sigma SPM \times 100\% \\ &= (13.250 + 2.044) / (13.250 + 2.044) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas hasilnya adalah 100%, artinya sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat dengan bobot 20% tercapai.

Upaya yang dilakukan agar penatausahaan keuangan selalu akurat antara lain:

- ❖ pencairan dilakukan dengan teliti dan cermat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran
- ❖ komunikasi yang terus dibangun dengan perangkat daerah, sebagai upaya kelancaran proses penatausahaan keuangan.
- ❖ penggunaan sistem yang direkomendasikan pemerintah pusat dan dibantu beberapa sistem pendukung yang memadai
- ❖ peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) lewat pelatihan internal.

e. Capaian kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

Capain kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten diukur melalui hasil evaluasi APBD Kab/Kota, regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan dan prosedur, serta mengoptimalkan kinerja BUMD.

Data evaluasi APBD Kab/Kota, pembinaan pengelolaan keuangan, penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel III.12 Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan Pengelola Keuangan dan Optimalisasi BUMD

No.	Uraian	Target	Realisasi	%	Bobot
1	2	3	4	5	6
1	Evaluasi APBD Kab / Kota (Σ EAP)				34,00%
1.1	APBD TA. 2023	5 dokumen	5 dokumen	100%	34,00%
1.2	PAPBD TA. 2022	5 dokumen	5 dokumen	100%	
1.3	Pertanggungjawaban APBD TA 2021	5 dokumen	5 dokumen	100%	
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan (Σ EAK)				33,00%
2.1	Regulasi	20 dokumen	- 15 dokumen Penetapan KPA Dana Dekonsentrasi	100%	33,00%
No.	Uraian	Target	Realisasi	%	Bobot

1	2	3	4	5	6
			- 1 dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - 2 dokumen tentang penetapan Bendahara dan KPA BOS - 2 dokumen penetapan bendahara KPA/KPB		
3	Optimalisasi BUMD (Penguatan kelembagaan, Penurunan NPL, Deviden dan Penyaluran Dana Pemerintah (ΣEAD))				33,00%
3.1	Penurunan NPL	20,66 %	25,27%	106,22%	
3.2	Deviden			100%	
3.2.1	Deviden BUMD	102.429.695.670,29	102.429.695.670,29	100%	
3.2.2	Deviden BUKP	3.500.000.000	5.164.189.937,32	147,55%	
3.3	Penyaluran Dana Pemerintah			22,02%	
3.3.1	PT Bank BPD DIY	270.600.000.000	173.675.000.000	22,02%	

Sumberdata : BPKA DIY, Tahun 2022, diolah

Dari data diatas, perhitungan dari sub indikator realisasi evaluasi APBD Kabupaten/Kota (ΣEAP) dengan bobot 34,00%, sub indikator pembinaan pengelolaan keuangan (ΣEAK) sebesar 33,00% dan sub indikator Optimalisasi BUMD berupa penguatan kelembagaan penurunan NPL, deviden dan penyaluran dana pemerintah (ΣEAD) sebesar 33,00%. Secara akumulatif sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah konsisten, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \Sigma PKD &= \Sigma EAP + \Sigma EAK + \Sigma EAD \\
 &= 34,00\% + 33,00\% + 33,00 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sesuai perhitungan diatas, hasil nya adalah 100% maka bobot 20% tercapai.

Agar kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah selalu konsisten, upaya yang dilakukan antara lain yaitu berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dalam melakukan Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota, responsif dalam menindaklanjuti amanah perundang-undangan, komunikasi dan koordinasi terus dibangun dengan mitra kerja baik OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah serta pembinaan yang intensif dan efektif kepada Badan Usaha Kredit Pedesaan.

Faktor Pendukung keberhasilan

- Komitmen dan pemahaman para stakeholder terkait pengelolaan keuangan daerah berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan melalui bimbingan teknis, diklat dan sarana pengembangan kompetensi lainnya berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah
- Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik;
- Dukungan anggaran, koordinasi dan kerjasama yang intensif antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya paratur pelaksana dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Regulasi pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menata kelembagaan perangkat daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.

3.1.2. Sasaran Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY

Tolok ukur capaian sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY diukur dengan dengan indikator Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Indikator: Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	<u>Meta indikator:</u> Nilai proyeksi aset pengelola

Sumber data diolah dari perhitungan nilai rupiah realisasi atas proyeksi aset-aset pengelola, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$OAP = \sum ORD + \sum OTP + \sum ODS + \sum OPD$$

Keterangan:

- OAP = Optimalisasi aset
 ORD = Retribusi rumah dinas tanah dan bangunan
 OTP = Sewa lahan, tanah dan bangunan
 ODS = Kontribusi pihak ketiga
 OPD = Hasil penjualan Daerah

Kinerja sasaran optimalisasi aset-aset Pemda dengan indikator optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	5.239.098.025	6.967.568.518	15.486.233.611	222,26% ((15.486.233.611/ 6.967.568.518) x 100%)	6.967.568.518	222,26

Analisis Ketercapaian Sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda adalah sebagai berikut:

- Tercapai Rp15.486.233.611,00 dari proyeksi Rp6.967.568.518,00 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 222,26%, sehingga target tahun 2022 tercapai.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu (2021) sebesar Rp5.239.098.025,00 terdapat peningkatan sebesar Rp10.251.135.586,00 atau 195,67%.
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun terakhir perencanaan periode 2017-2022

Data realisasi atas proyeksi optimalisasi aset pada pengelola barang milik daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.15 Nilai Realisasi Optimalisasi Aset tahun 2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Retribusi Rumah dinas	103.150.510
2	Retribusi tanah dan bangunan	336.973.976
3	Sewa lahan, tanah dan bangunan	12.359.514.500
4	Kontribusi PT Yogya Indah Sejahtera (PT YIS)	883.000.000
5	Hasil Penjualan Daerah	1.853.594.625
	Jumlah (Σ)	15.486.233.611

Sumber data: Laporan Neraca Aset BPKA DIY Tahun 2022, diolah

Hasil penghitungan nilai optimalisasi aset-aset pengelola BMD sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{OAP} &= \sum \text{ORD} + \sum \text{OTP} + \sum \text{ODS} + \sum \text{OPD} \\
 &= (103.150.510 + 336.973.976) + 12.359.514.500 + 883.000.000 + 1.853.594.625 \\
 &= 440.124.486 + 12.359.514.500 + 883.000.000 + 1.853.594.625 \\
 &= \underline{15.486.233.611,00}
 \end{aligned}$$

Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah tercapai dikarenakan adanya obyek baru optimalisasi yaitu penjualan barang daerah, juga dengan selesainya kerjasama selama 30 tahun dalam bentuk Bulid Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) sehingga bangunan barang milik daerah di Jalan Malioboro berupa Mall dan Hotel bisa disewakan oleh pihak swasta.

Faktor Pendukung keberhasilan :

- Pengembalian bangunan setelah BOT (30 tahun)
- Nilai appraisal pemanfaatan barang milik daerah dapat dimaksimalkan
- Pendayagunaan barang milik daerah untuk menunjang peningkatan asli daerah dapat dioptimalkan
- inventarisasi dan hasil penilaian barang milik daerah ditindaklanjuti dalam rangka pemanfaatan kembali telah selesai.

3.2. Realisasi Anggaran

Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Efisiensi	
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100 %	100	1.395.707.021.346	1.327.267.076.871	95,09	4,91%
2	Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah	Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	6.967.568.518	15.486.233.611	222,26	4.545.127.500	3.963.731.956	87,21	12,79%
Jumlah						1.400.252.148.846	1.331.230.808.827	95,07	4,93%
Total Belanja Operasional						1.500.550.634.235	1.426.774.345.578	95,08	

Sumber data : Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKA Tahun 2022 Unaudited, diolah

- Sisa pengadaan barang dan jasa

Tantand

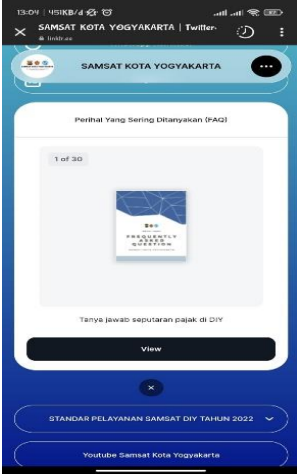
Mobile Banking BPD DIY & Jorgia Kita

2. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)



Sebanyak 35 Obyek Pendapatan Daerah baru telah menggunakan *QRIS* Pemda DIY di tahun 2022 yaitu:

1. Badan Kepegawaian Daerah DIY
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY
5. Balai Pemuda dan Olah Raga DIY
6. SMKN 6 Yogyakarta
7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
8. Dinas Perhubungan DIY
9. Dinas Kebudayaan DIY
10. Museum Sonobudoyo pada Dinas Kebudayaan DIY
11. UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan DIY
12. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
13. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai DIY
14. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya DIY
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY
18. Badan Penghubung Daerah DIY
19. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY
20. Balai Pengembangan Jasa Kontruksi DIY

		Admin akan menjawab dan memberikan penjelasan kepada wajib pajak dengan respon time kurang dari satu jam. Pengguna : 3.167	
		4. “Whatsapp Reminder” Wajib pajak dapat mengisikan nomor WA HP untuk mendapatkan WA Reminder jatuh tempo pajak. Manfaat dari layanan ini adalah mengirimkan pesan untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo PKB kepada wajib pajak supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran sehingga wajib pajak terhindar dari denda keterlambatan. Saat ini jumlah nomor WA yang masuk dengan menggunakan link ini sudah melebihi target. Pengguna : 281	
		5. “Pengaduan” Merupakan layanan online untuk menerima keluhan terhadap pelayanan di Samsat Kota Yogyakarta dari wajib pajak. Dengan adanya layanan ini diharapkan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan dapat ditangani dengan baik. Tujuan dari fitur ini untuk memperkuat penawasan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Samsat Kota Yogyakarta. Pengguna : 199	
		6. “Perihal Yang sering Ditanyakan (FAQ)” Buku berukuran kecil dan bisa dibawa ke mana-mana dalam bentuk hardfile dan softfile yang berisi tentang berbagai macam penjelasan mengenai layanan kesamsatan di Samsat Kota Yogyakarta. Wajib pajak juga dapat mengakses buku ini yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan beserta jawabannya. Dengan buku saku ini memudahkan petugas samsat untuk memahami inti dari berbagai proses layanan kesamsatan dan wajib pajak lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Sehingga petugas memahami berbagai macam proses layanan kesamsatan dan menjadi pedoman yang bisa dibawa ke mana-mana. Pengguna : 418	

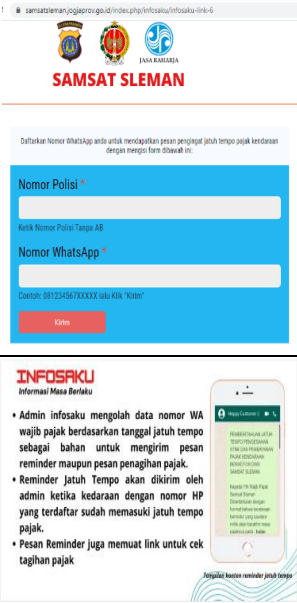
		7. “Standar Pelayanan Samsat DIY” Buku standar yang dapat kami gunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan mudah. Pengguna : 181	
2	Go-jak	Layanan Jemput Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak sesuai jadwal di Kantor Kemantren dan Kalurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Kemantren dan kelurahan dapat mengajukan ke Samsat Kota Yogyakarta untuk mengatur jadwal pelayanan di bulan berikutnya.	
3	SAMSAT DELIVERY GO DOOR PAKMO / JEMPUT BOLA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Samsat Delivery Go Door Pakmo adalah Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Jemput Bola langsung ke rumah wajib pajak dengan menggunakan armada kendaraan roda dua yang sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan lapangan. Layanan ini adalah sebuah wujud nyata dari konsep mendekatkan layanan ke masyarakat sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) pasal 22 terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Samsat Delivery Go Door Pakmo melayani jemput bola pembayaran kendaraan bermotor dari rumah ke rumah, kantor instansi, kampus, sekolah, pabrik, pasar atau komunitas lainnya. Untuk mendapat pelayanan cukup menghubungi nomor Whatsapp yang sudah kami sediakan kemudian admin Samsat Delivery Go Door Pakmo akan menjadwalkannya, apabila langsung bisa di layani hari itu maka petugas akan segera melakukan jemput bola hari itu juga, namun apabila pada hari itu petugas sudah penuh melakukan jemput bola ditempat lain maka akan dijadwalkan dihari berikutnya. Dengan layanan Samsat Delivery Go Door Pakmo masyarakat tidak perlu keluar rumah, namun petugas yang akan mendatangi ke alamat rumah dan proses pembayaran dilakukan di rumah langsung selesai tidak perlu datang ke kantor samsat. Untk pembayaran bisa secara tunai maupun non tunai dengan memanfaatkan <i>QRIS</i>.	  

4	Go-Jak Goes To Campus	Dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Yogyakarta, dan mengingat kota Yogyakarta sebagai kota pelajar yang notabene terdapat mahasiswa dari luar daerah yang menuntut ilmu di kota Yogyakarta dan sebagian besar adalah pengguna kendaraan bermotor bernomor polisi AB, maka kami Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta (Samsat Kota Yogyakarta), menawarkan program Pembayaran Pajak Tahunan Jemput Bola dengan menghadirkan Layanan Go Jak (Go Pajak) Goes to Kampus, khusus untuk mahasiswa, dosen dan karyawan di lingkungan kampus. Pihak universitas dapat menghubungi Samsat Kota Yogyakarta untuk mendapat layanan pembayaran pajak tahunan dengan minimal 5 Wajib Pajak AB kota.	
---	------------------------------	---	---

2. KPPD DIY di Kabupaten Bantul

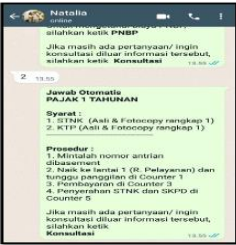
No	Nama Inovasi	Deskripsi	Foto
1	JEMPOL SI PANDA (Jemput bola potensi pajak kendaraan)	Kegiatan Jempol Si Panda (Jemput bola potensi pajak kendaraan) memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran di tempat yang ditentukan (misalnya di kantor kalurahan/perusahaan) dengan minimal 10 wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor. Instansi yang bersangkutan dapat menghubungi Samsat Bantul untuk mengatur jadwal pelayanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara wajib pajak dengan petugas.	 Selasa, 27 Desember 2022 Kegiatan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahunan dan 5 Tahunan di Kaparewon Pleret, Inovasi Cak Fisik Mobile "JEMPOL SI PANDA" 0821-3545-4392 samsatbantul
2	PAK MATUN LAN SI CEMOL (Pajak kendaraan lima tahunan dengan layanan registrasi cek fisik mobile)	Melalui inovasi PAK MATUN LAN SI CEMOL, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan di tempat yang telah ditentukan (misalnya di kantor kalurahan/perusahaan). Untuk saat ini PAK MATUN LAN SI CEMOL dapat dilakukan untuk kendaraan Roda dua (R2) sementara untuk pengambilan STNK dan TNKB tetap dilakukan di samsat induk.	 Selasa, 27 Desember 2022 Kegiatan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahunan dan 5 Tahunan di Kaparewon Pleret, Inovasi Cak Fisik Mobile "CEMOL" 0821-3545-4392 samsatbantul
3	MAS IJAT (Informasi Peningat Jatuh Tempo)	MAS IJAT (Informasi Peningat Jatuh Tempo) adalah sarana untuk mengingatkan wajib pajak mengenai tanggal jatuh tempo kendaraan bermotor. Wajib pajak cukup mengisi form yang telah disediakan kemudian petugas akan menginput data dan memberikan informasi peningcat jatuh tempo pajak kendaraan mendekati tanggal jatuh tempo kendaraan bermotor.	

3. KPPD DIY di Kabupaten Sleman

No	Nama Inovasi	Deskripsi	Foto
1	INFOSAKU (Informasi Masa Berlaku)	INFOSAKU (Informasi Masa Berlaku) adalah layanan unggulan dari KPPD Sleman yang akan memberikan informasi berupa pengingat mengenai masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang akan segera berakhir. Manfaat dari layanan ini adalah untuk mencegah wajib pajak yang lupa dalam membayar pajak kendaraan, sehingga wajib pajak terhindar dari denda karena terlambat membayarkan pajak yang telah jatuh tempo. Admin INFOSAKU akan mengirimkan pemberitahuan masa berlaku pajak yang segera berakhir melalui pesan <i>Whatsapp</i> 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo, sehingga wajib pajak bisa leluasa dalam mempersiapkan waktu pembayaran pajak. Infosaku menggunakan data nomor <i>Whatsapp</i> yang sudah terdaftar pada aplikasi samsat dan terus berupaya untuk mendapatkan nomor <i>Whatsapp</i> wajib pajak yang belum terdaftar melalui website samsat maupun secara langsung saat wajib pajak membayar di loket layanan.	
2	SAMSAT ON CALL (Pelayanan Perpanjangan Pajak Kendaraan Tahunan dengan Perjanjian)	Layanan Samsat On Call merupakan terobosan layanan yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan waktu pembayaran yang fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan layanan Samsat on Call ini pembayaran pajak tahunan tidak perlu lagi datang ke Samsat Sleman, petugas Samsat Sleman yang akan datang ke Kantor, Pabrik, Komunitas maupun kelompok-kelompok lainnya, hanya dengan syarat memenuhi 10 kendaraan sebagai persyaratan minimal untuk menghadirkan Samsat on Call. Samsat On Call memiliki keunikan bahwa bayar pajak tahunan tidak harus datang ke Samsat, tidak harus mengikuti jadwal layanan yang sudah ditentukan oleh Samsat, tetapi wajib pajak sendiri yang membuat jadwal pelaksanaan pembayaran pajak. Adanya layanan ini dapat membantu wajib pajak dalam menghindari keterlambatan pembayaran pajak karena faktor tidak sempat datang ke Samsat, selain itu layanan Samsat On Call ini membantu mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat pada masa pandemi sehingga sangat mendukung untuk mengurangi terciptanya kerumunan massa.	

3	Pojok SIMPATIK	Pojok Simpatik adalah layanan informasi kesamsatan, Pengaduan atas layanan yang diberikan Samsat Sleman dan sebagai pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan kerja Samsat Sleman. Pojok SIMPATIK memiliki tujuan untuk: Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kesamsatan, memberikan akses untuk pengaduan pelayanan kesamsatan, dan memudahkan masyarakat untuk melaporkan gratifikasi, korupsi maupun pungutan yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Cara untuk mengakses Pojok SIMPATIK sangat mudah, yakni Wajib pajak bisa datang ke lokasi Pojok SIMPATIK di halaman depan Samsat Sleman, atau menghubungi Petugas Pojok SIMPATIK melalui Telepon Bebas Pulsa 0800 1503 999 dan WhatsApp 081717251041.	 
---	----------------	---	--

4. KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo

No	Nama Inovasi	Deskripsi	Foto
1	MITAYANI : Melalui Telepon Kita Melayani	Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui alat komunikasi dengan mendekatkan layanan sesuai permintaan Wajib Pajak serta mengolah tunggakan pajak	 
2	TAKON AKU : Kontak Online Admin Samsat Kulon Progo	Layanan Informasi dan Konsultasi secara otomatis (24 jam) Melalui Whatsapp	 

3	PIKANTUK EMAS : Program Edukasi Untuk Pelajar Menengah Atas	Memperkenalkan Layanan Kesamsatan Kepada Pelajar Sekolah Menengah sebagai salah satu obyek kegiatan sosialisasi kesamsatan	
---	---	--	---

5. KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Inovasi	Deskripsi	Foto
1	SAMSAT x McD - mudah, cepat, dan dekat	“SAMSAT x McD” memiliki makna pelayanan kesamsatan yang berpedoman pada prinsip mudah, cepat, dan dekat. Mudah, artinya wajib pajak tidak merasa terbebani ketika membayar pajak. Cepat, artinya wajib pajak tidak perlu menunggu lama ketika membayar pajak. Dekat, artinya petugas Samsat yang “mendatangi” wajib pajak	
2	Gertak Pak Kades (Gerakan Taat Pajak Pakai Kader Desa)	Gertak Pak Kades adalah Gerakan Taat Pajak Pakai Kader Desa, yaitu inovasi untuk mengurangi tanggakan pajak dengan suatu gerakan agar masyarakat wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan melibatkan Perangkat Desa untuk terlibat dan terjun langsung sebagai ujung tombak untuk melaksanakan penagihan terhadap masyarakat wajib pajak yang masih menunggak atau belum melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melewati tanggal jatuh tempo.	
3	Bajak Sawah (Bayar pajak sawayah-wayah)	Bajak sawah adalah pelayanan kesamsatan di luar jam kerja, mulai dari sore hari pukul 16.00 hingga malam hari pukul 20.00 pada hari kerja, dan pukul 07.30 hingga pukul 10.30 pada hari Minggu menggunakan bis samsat keliling bertempat di depan Toserba Sambipitu dan Alun-alun Pemda	

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor.

Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi pertemuan, aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Ketepatan Penyusunan APBD dan Perubahan PAPBD	30 OPD	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Evaluasi Penyusunan APBD 2. Peningkatan Kapasitas TAPD
		Kemendagri RI	Konsultasi, Komunikasi, Informasi dan Evaluasi			
		Dunia usaha	-			
		Perguruan tinggi	Masukan, Isu dan Strategi			
		Masyarakat	Masukan permasalahan			
2.	Penatausahaan Keuangan Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, kesepakatan, aplikasi SIPD dan pendampingan teknis Konsultasi informasi dan evaluasi, persyaratan pencairan Dana Pusat ke Daerah	Akuratisasi penatausahaan keuangan daerah	30 OPD	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2. Mendukung pencapaian kinerja

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Kemendagri RI	Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran JKK-JKM			Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Rekapitulasi dan Penyusunan Usulan Gaji 2. Peningkatan Kapasitas TAPD
		PT Taspen Bank BPD DIY	Berita Acara Rekonsiliasi Kas Daerah			
		KPPN dan KPP Pratama	Berita Acara Rekon Pajak Pusat			
		BPJS Kesehatan	Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran iuran BPJS			
3.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kemendagri RI, Kemenkeu BPK RI Inspektorat/APIP DPRD DIY	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, dan pendampingan Konsultasi dan evaluasi, Penilaian/penghargaan Audit/Pemeriksaan LK Reviu Laporan Keuangan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Ketepatan penyampaian LKPD dan pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
						Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan evaluasi dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Peningkatan kinerja TAPD
4.	Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Kemendagri RI	Konsultasi dan evaluasi, informasi	Pembinaan pengelolaan keuangan yang konsisten	83 lembaga (5 Pemda Kabupaten/Kota, 3 BUMD, 75 BUKP	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Tim Evaluasi APBD kab/Kota	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi dan bahan evaluasi/pencermatan			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Tindak lanjut hasil evaluasi 2. Peningkatan kinerja Tim Evaluasi
		Inspektorat/APIP	Pengawasan internal pemerintah			-
		BLUD	Input dasar pembinaan			-
		Bappeda DIY	Perencanaan tahunan			-

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Biro Hukum	Kebijakan peraturan perundangan, mekanisme administrasi dan legislasi BUMD			-
5	Pengelolaan Pendapatan Daerah	TAPD	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi implementasi, rekonsiliasi aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Ketercapaian Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah	18 OPD berpendapatan	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 5. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 6. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 7. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Kepolisian	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			Bagi Kelompok Sasaran: 3. Bahan Tindak lanjut perencanaan pendapatan 4. Peningkatan kinerja petugas pelayanan kesamsatan
		PT Jasa Raharja	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			
		Pertamina	Penetapan target, penghitungan realisasi dan ketercapaian pajak PBBKB			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Media massa	Publikasi kebijakan			
		Masyarakat	Masukan/sumber pajak daerah			
		Dunia usaha/dealer otomotif	Ketercapaian PAD dari sector BBNKB			
6.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pencermatan dokumen RKA OPD	Optimalisasi Barang Milik Daerah	30 OPD	Bagi OPD: 1.Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) 2.Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3.Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4.Mendukung pencapaian kinerja sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY
		BPK RI	Bahan Pemeriksaan laporan keuangan			
		Dinas Perhubungan	Tim Penilai Independen obyek penindahtanganan BMD			Bagi Kelompok Sasaran: 5.Bahan Tindak lanjut penilaian

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
						dan penyusunan RKBMD 6.Peningkatan kinerja Tim Evaluasi
		Dinas PU ESDM	Tim Penilai Independen			
		KPKNL	Pelaksana lelang BMD			
		Bappeda	Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah			
		Inspektorat	Reviu dan Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan BMD			
		Biro Hukum	Legalisasi Pelaksanaan pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, pada tahun 2022 dari 2 indikator seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.
2. Faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:
 - Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah;
 - Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik;
 - Peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah melalui bimbingan teknis, diklat dan sarana pengembangan kompetensi lainnya;
 - Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- ✓ Penyesuaian regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- ✓ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.
- ✓ Menyusun kerangka kebijakan yang komprehensif terkait pengelolaan BMD.
- ✓ Meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lintas sektor terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Visi : Terwujudnya peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Misi : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Tusi: menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset (Pergub DIY Nomor 123 tahun 2021)

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Ket
					Tahun-1 (2018)	Tahun-2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas pengelola keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	%	100	100	100	100	100	
		Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Barang Milik Daerah	rupiah	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	21
					Triwulan II	48
					Triwulan III	75
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rp	6.967.568.518	Triwulan I	2.245.441.800
					Triwulan II	2.427.733.600
					Triwulan III	3.419.000.000
					Triwulan IV	6.967.568.518

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.627.481.000,-
2.	Program Peningkatan Pendapatan KPPD		
3.	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp1.326.817.617.122,-
4.	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah		
5.	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		
6.	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
7.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
8.	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 4.545.127.500,-

9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 84.205.249.628,-
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
 NIP.196802151994031005

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
INSPEKTORAT

ꦏꦼꦧꦺꦤ꧀ꦒꦸꦁꦠꦺꦴꦒꦺꦴꦢꦶꦩꦭꦠꦶꦱꦼꦩꦤ

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 15 - 03 - 2022

Nomor : 700/01104
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset DIY Tahun 2021

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
di _ Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 056/II/INSP/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan tujuan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

b. Aspek...

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang Dilaporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja yang Dilaporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memperoleh nilai sebesar **88,16** kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel;
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 30,00 atau 100% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,51 atau 98,06% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,50 atau 90,00% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,23 atau 66,15% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020, telah dilakukan perbaikan kinerja khususnya pada kinerja utama organisasi (IKU) dan penilaian dari stakeholder yang meningkat capaian kinerjanya dibanding tahun sebelumnya.

6. Sehubungan ...

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya :

- a. Meningkatkan kinerja pada Aspek Evaluasi Internal, khususnya evaluasi internal atas pelaksanaan sub kegiatan melalui penyempurnaan metode pengumpulan data dan supervisi;
- b. Meningkatkan kinerja pada Aspek Pelaporan Kinerja, khususnya kualitas Laporan Kinerja Instansi sehingga uraian hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja lebih informatif;
- c. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik *output* maupun *outcome* yang ditetapkan dapat tercapai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Pswt. 1117 Faksimile (0274) 521818

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA (2021)
OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

No	REKOMENDASI LHE SAKIP Surat Inspektur DIY Nomor 700/01104: tanggal 15 Maret 2022	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatkan kinerja pada aspek evaluasi internal, khususnya evaluasi internal atas pelaksanaan sub kegiatan melalui penyempurnaan metode pengumpulan data dan supervisi	Melakukan evaluasi internal pelaksanaan sub kegiatan melalui penyempurnaan metode pengumpulan data dan supervisi
2.	Meningkatkan kinerja pada aspek pelaporan kinerja khususnya kualitas laporan kinerja instansi sehingga uraian hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja lebih informatif	Melakukan peningkatan kinerja pada aspek laporan kinerja instansi sehingga uraian hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja lebih informatif
3.	Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja instansi sehingga seluruh target baik output maupun <i>outcome</i> yang ditetapkan dapat tercapai	Melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja instansi sehingga seluruh target baik output maupun <i>outcome</i> yang ditetapkan dapat tercapai.

Yogyakarta, Januari 2023

KEPALA BPKA DIY



WIYOS SANTOSO, SE., M.A. cc
NIP. 19680215 199403 1 005



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA